

Analisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi

Ni Made Arsita Kusumadewi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Miftahul Hariz

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Muhammad Yasin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jatim, 60118

Korespondensi penulis: madewi18@gmail.com

Abstract: Poverty is a major problem for countries throughout the world, developing countries themselves have a lot of poverty among their people. Poverty is a condition where a person cannot fulfill their basic needs such as clothing, food, shelter, health and education. One of the benchmarks for assessing the success of socio-economic development is poverty itself (Priseptian & Primandhana, 2022). The portrait of poverty in Indonesia's big cities is marked by the mushrooming of semi-permanent houses on riverbanks and along railway tracks. The portrait of poverty in post-reform Indonesia is at least reflected in the 2014 Human Development Index (HDI) data released by the United Nations Development Program (UNDP). The causes of poverty in Indonesia after the reform era are caused by internal and external factors. From the causes of poverty, a) unemployment, b) crime, c) dropping out of school, d) poor health, e) the next generation will emerge.

Keywords: Poverty, Consequence, Pos-Reformation, Indonesia, Internal external factors

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah yang utama bagi negara di seluruh dunia, negara berkembang sendiri banyak sekali terjadi kemiskinan pada masyarakatnya. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) kesehatan dan pendidikan. Salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan sosial ekonomi adalah kemiskinan sendiri. Potret kemiskinan di kota-kota besar Indonesia ditandai dengan menjamurnya rumah-rumah semi permanen di bantaran sungai dan sisi rel kereta api. Potret kemiskinan Indonesia pasca reformasi sekurangnya tercermin pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2014 yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP). Penyebab kemiskinan di Indonesia pasca era reformasi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dari adanya penyebab kemiskinan tersebut maka akan muncul a) pengangguran, b) kriminalitas c) putus sekolah, d) kesehatan, e) generasi penerus yang buruk.

Kata kunci: Kemiskinan, Konsekuensi, Pasca Reformasi, Indonesia, Faktor Eksternal Internal

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi negara di seluruh dunia karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dan di definisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Yunus & Radjab, 2018) negara berkembang sendiri banyak sekali terjadi kemiskinan pada masyarakatnya. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) kesehatan dan pendidikan. Salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan sosial ekonomi adalah kemiskinan sendiri (Priseptian & Primandhana, 2022).

Potret kemiskinan di kota-kota besar Indonesia ditandai dengan menjamurnya rumah-rumah semi permanen di bantaran sungai dan sisi rel kereta api, banyak anak jalanan, pengemis dan gelandangan, sementara di daerah pedesaan Indonesia, kemiskinan ditunjukkan dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pendidikan dan informasi, serta semakin banyaknya generasi muda yang memilih bekerja sebagai buruh migran di negara-negara tetangga.

Pada masa sebelum reformasi yaitu awal tahun 1998 mulai dirasakan terjadinya krisis finansial Asia yang membuat kondisi perekonomian Indonesia melemah dengan melambungnya nilai Dollar Amerika terhadap Rupiah (\$1 = Rp 17.000) akibatnya harga barang-barang naik yang membuat beban masyarakat. Beban berat kehidupan masyarakat tersebut ditambah dengan ketidakpuasan terhadap terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan yang ketujuh kalinya. Kegagalan Presiden Soeharto dalam mengawal keamanan perekonomian nasional menjadi pemicu ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadi target utama untuk diruntuhkan atau dilengserkan. Gerakan sosial yang menyuarakan ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan dari berbagai komponen dilakukan reformasi politik oleh komponen mahasiswa akademisi yang relevan (Syam, 2010).

Potret kemiskinan Indonesia pasca reformasi sekurangnya tercermin pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2014 yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP), bahwa IPM Indonesia pada posisi yang sama pada tahun 2001, yaitu di peringkat 108 dari 187 negara. Peringkat IPM Indonesia tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masi pada tingkat bawah (Nur, 2009). Pemerintah pasca reformasi secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan upaya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal itu terlihat pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas nasional. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang tujuannya menurunkan angka kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014. Hasilnya adalah bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah orang miskin Indonesia meskipun belum seperti diharapkan.

KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan menurut Chamber adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2)ketidakberdayaan (powerless), 3)kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis. Selanjutnya Supriatna (1997:90) menyatakan

bahwa kemiskinan adalah kondisi yang sepenuhnya membatasi yang tidak terjadi dalam kehendak seseorang (Suryawati, 2005).

Lebih lanjut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) mengatakan bahwa ada lima karakteristik penduduk miskin. Lima karakteristik penduduk miskin tersebut ialah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Menurut (Prayoga et al., 2021) ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, termasuk taraf hidup masyarakat yang buruk, upah minimum yang tidak memadai, dan peningkatan jumlah pengangguran tanpa kesempatan kerja tambahan setiap tahunnya. Strategi untuk mengatasi kemiskinan bergantung pada strategi pembangunan negara. Karena adanya "perangkap kemiskinan", atau perangkap kemiskinan, program-program untuk memerangi kemiskinan seringkali tidak mencapai hasil yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Dalam membuat analisis sebab, akibat, dan solusi kemiskinan di Indonesia pasca era reformasi menggunakan beberapa data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis ini menggunakan studi kepustakaan untuk pengumpulan data untuk mengidentifikasi kondisi umum dan khusus yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dengan mempelajari catatan, dokumen, dan materi dari berbagai media cetak dan elektronik.

Jenis analisis ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan rinci terhadap gejala tertentu. Studi kasus juga menyelidiki dan memahami peristiwa atau masalah dengan mengumpulkan berbagai macam informasi, yang kemudian diolah untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi penyebabnya.



Sumber: Diolah dari data Susenas

Gambar 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin 2009-2015

Tingkat kemiskinan di Indonesia umumnya mengalami penurunan dari 2009 hingga Maret 2015, kecuali pada bulan September 2013 dan Maret 2015. Pada bulan September 2013,

jumlah dan presentase penduduk miskin naik dibandingkan Maret 2015, karena kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak pada Juni 2013. Kemudian, dari September 2014 hingga Maret 2015, jumlah dan presentase penduduk miskin kembali turun (Badan Pusat Statistik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika dilihat dari data yang ditarik dari pasca reformasi pada rentang 1999-2004 di Indonesia, pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 6,77%. Pada 2014-2019, penurunan kemiskinan sebesar 1,74%. Bahkan, penurunan angka kemiskinan di Indonesia disebut sebagai upaya progresif pemerintah di mata negara-negara dunia. Salah satu sumber masalah kemiskinan di Indonesia adalah tingginya disparitas pendapatan antar wilayah karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Akibatnya, perbedaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin meningkat (Abdussamad, 2023).

Penyebab terjadinya Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi

Indonesia masih dihadapkan oleh banyak persoalan terkait tingkat kemiskinan di dalam negeri (Sukei, 2015). Di antaranya perbedaan tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan yang masih tampak jelas. Pada September 2019 di desa persentase kemiskinannya hampir dua kali lipatnya dari tingkat kemiskinan di kota yakni 12,60%. Sedangkan, angka kemiskinan di kota berada di angka 6,56% (Finaka, 2021). Maka dari itu kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Faktor Internal

- a. Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.
- b. Motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.
- c. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

b) Faktor Eksternal

- a. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur

pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

- b. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak (Itang, 2015).

Penyebab lain dari kemiskinan di Indonesia juga banyak disambungkan dengan:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal, seperti pendapatan karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.

Garis Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi

Garis Kemiskinan (GK) digunakan sebagai ambang batas untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam kelompok miskin atau tidak miskin. Konsep dari Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, seseorang tergolong tidak miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya berada di atas garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah harga yang harus dibayar oleh kelompok referensi untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/orang/hari dan kebutuhan non pangan yang tidak esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. kebutuhan lainnya.

Sebagai contoh, berikut adalah ilustrasi dalam pembentukan garis kemiskinan dan perubahannya menurut daerah di Indonesia.

Tabel 1. Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, Maret 2014-Maret 2015

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Presentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2014	10,51	8,34
September 2014	10,36	8,16
Maret 2015	10,65	8,29
Perdesaan		
Maret 2014	17,77	14,17
September 2014	17,37	13,76
Maret 2015	17,94	14,21
Perkotaan+Perdesaan		
Maret 2014	29,28	11,25
September 2014	27,73	10,96
Maret 2015	28,59	11,22

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2014, September 2014, dan Maret 2015.

September 2014 dan Maret 2015 Selama periode September 2014-Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,91 persen, yaitu dari Rp 312.328,00 per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp 330.776,00 per kapita per bulan pada Maret 2015. Sementara pada periode Maret 2014-Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,26 persen, yaitu dari Rp 302.735,00 per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp 330.776,00 per kapita per bulan pada Maret 2015. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2015 sebesar 73,23 persen. Pada Maret 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 23,49 persen di perkotaan dan 32,88 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap Garis Kemiskinan (8,24 persen di perkotaan dan 7,07 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,59 persen di perkotaan dan 2,91 persen di perdesaan), mie instan (2,77 persen di perkotaan dan 2,44 di perdesaan), dan seterusnya. Sementara itu terdapat komoditi lain memberi sumbangan berbeda terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan seperti misalnya Roti manis/roti lainnya hanya memberi sumbangan besar terhadap GK di perkotaan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel2.

Tabel 2. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2015

Perkotaan		Perdesaan	
(1)		(2)	
Beras	23,49	Beras	32,88
Rokok kretek filter	8,24	Rokok kretek filter	7,07
Telur ayam ras	3,59	Telur ayam ras	2,91
Mie instan	2,77	Mie instan	2,44
Rokok kretek	2,65	Rokok kretek	1,98
Rokok kretek/rokok lainnya	1,89	Rokok kretek/rokok lainnya	1,52
Telur	1,89	Telur	1,52
Rokok kretek/rokok lainnya	1,75	Rokok kretek/rokok lainnya	1,52
Sumbangan Perumahan		Sumbangan Perumahan	
Perumahan	9,52	Perumahan	9,52
Sandang	3,75	Sandang	3,75
Pendidikan	2,40	Pendidikan	2,40
Kesehatan	1,35	Kesehatan	1,35
Rokok kretek	1,40	Rokok kretek	1,40

Sumber: Diolah dari data Survei Susenas Maret 2015

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Sementara itu terdapat komoditi bukan makanan lainnyayang memberi sumbangan berbeda pada GK di perkotaan dan perdesaan, yaitu angkutan yang hanya memberi sumbangan besar terhadap GK di perkotaan atau kayu bakar yang hanya memberi sumbangan besar terhadap GK di perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2015).

Konsekuensi Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi

Pada dasarnya kemiskinan akan memberikan konsekuensi bagi masyarakat yang menyandangnya, berikut adalah beberapa konsekuensi dari kemiskinan yang diantaranya:

Pengangguran

Pengangguran dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang bukan hanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap tetapi juga sedang mencari pekerjaan (Ayu, 2018). Pengangguran merupakan dampak yang paling terlihat nyata dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya. Pengangguran sendiri akan berdampak lagi bagi kegiatan perekonomian, seperti:

- 1) Pendapatan nasional Riil (nyata) yang dicapai oleh masyarakat lebih rendah dari pada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Sehingga kemakmuran yang dicapai masyarakat pun lebih rendah.
- 2) Pengangguran menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- 3) Tingkat kemakmuran yang dapat dinikmati masyarakat lebih rendah daripada tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- 4) Menambah beban pengeluaran negara.

Kriminalitas

Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan.

Putus Sekolah

Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak (Pinontoan, 2020).

Kesehatan

Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

Generasi Penerus yang Buruk

Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal, tidur di jalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya (Itang, 2015).

Solusi dari Penyelesaian Masalah Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi

Di Indonesia, setiap periode pemerintahan memiliki fokus dan karakter masing-masing dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada pasca reformasi yaitu awal tahun 1998, angka kemiskinan naik signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik pada saat itu mengklarifikasi bahwa naiknya angka kemiskinan disebabkan oleh perubahan metode perhitungan jumlah penduduk miskin. Memasukkan periode 2000-an, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas). Di dalamnya ada empat strategi penanggulangan kemiskinan yang diajukan melalui penciptaan kesempatan (create opportunity), pemberdayaan masyarakat (people empowerment) dengan peningkatan akses kepada sumber daya ekonomi dan politik, peningkatan kemampuan (increasing capacity) melalui pendidikan dan perumahan, dan perlindungan sosial (social

protection) untuk mereka yang menderita cacat fisik, fakir miskin, keluarga terisolasi, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan korban konflik sosial (Admin, 2018).

Solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia pasca reformasi meliputi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat: Membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk membangun diri dan mengatasi kemiskinan (Armoyu, 2013).
- b. Program pengentasan kemiskinan: Menyediakan kebutuhan pokok (PMK, 2021).
- c. Penyediaan kredit mikro: Membantu masyarakat untuk memulai usaha kecil dan menengah (PMK, 2021).
- d. Pengembangan infrastruktur: Membangun jalan, sumber daya air, dan fasilitas lainnya yang dapat membantu masyarakat miskin (PMK, 2021).
- e. Pengembangan sektor jasa: Untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan (PMK, 2021).

Pemerintah juga mengembangkan program-program seperti Program Pembangunan Desa (PPD), Program Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD), dan Program Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD), yang fokus pada pembangunan masyarakat di desa-desa.

Perkiraan awal penyebab dari tidak efektifnya program penurunan angka kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. Dua hal yang penting yaitu, faktor dari dalam penduduk miskin itu sendiri yang biasanya tidak memiliki mental terhadap keadaan, mudah menyerah dan faktor lain yaitu dari luar seperti ketepatan dalam pemberian-bantuan (SAMSUDIN et al., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan di Indonesia pasca reformasi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dengan konsekuensi seperti pengangguran, kriminalitas, putus sekolah, kesehatan buruk, dan gangguan pada generasi penerus. Garis kemiskinan juga berhubungan dengan kemiskinan yang ada di Indonesia, karena Garis Kemiskinan (GK) digunakan sebagai ambang batas untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam kelompok miskin atau tidak miskin.

Oleh karena itu solusi untuk mengatasi kemiskinan termasuk menciptakan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan, dan perlindungan sosial. Pemerintah juga telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan.

Saran dari penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan pertimbangan terhadap penyebab, konsekuensi, solusi kemiskinan di Indonesia pasca reformasi antara lain:

- 1) Melakukan penelitian dengan topik yang sama dapat mengembangkan penelitian dengan tujuan yang lebih spesifik dan menempatkan lebih banyak perhatian pada topik penelitian nilai sejarah ekonomi di Indonesia.
- 2) Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti seperti upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2023). PUSARAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK (P. Rapanna (ed.); I). CV. syakir Mefia Press.
- Admin. (2018). Upaya Penanggulangan Kemiskinan dari Masa ke Masa. Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. <https://cpps.ugm.ac.id/upaya-penanggulangan-kemiskinan-dari-masa-ke-masa/>
- Armoyu, H. M. (2013). Pemberdayaan Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>
- Ayu, D. S. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 1(1), iii–vii.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2015. Berita Resmi Statistik, 86, 8. http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf
- Finaka, A. W. (2021). Angka Kemiskinan di Indonesia Turun Lagi. *Indonesia Baik.Id2021*. <https://indonesiabaik.id/infografis/angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-lagi>
- Itang. (2015). Faktor faktor penyebab kemiskinan. *Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(1), 1–30.
- Nur, R. (2009). Korelasi antara kemiskinan dengan konflik sosial. *Kerjasama Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan & Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI dengan Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi (Lessdem)*.
- Pinontoan, M. (2020). *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit NEM.
- PMK, K. (2021). *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Perdayaan Masyarakat*. Menko PMK.

- Prayoga, M. L., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135–142. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11058>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- SAMSUDIN, H., SADIMAN, D., & P. RATU BANGSAWAN, I. (2020). KAJIAN SOSIAL: MENUJU KEMISKINAN SATU DIGIT (S. Franeka (ed.)). Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin.
- Sukesi, K. (2015). Gender & kemiskinan di Indonesia (K. Sukesi (ed.)). Penerbit Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jmpk*, 08(03), 121–129.
- Syam, N. (2010). Jejak Reformasi Dalam Lintasan Sosio-Historis. Rencana Amandemen Ke 5 Dan Otonomi Daerah, 4.
- Yunus, R., & Radjab, M. (2018). Analisis Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. CV. Social Politic Genius (SIGn).